

HUBUNGAN SUMBER PENDAPATAN TERHADAP BELANJA MODAL PADA ANGGARAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON

Mestika F.L Ang¹
Grace B. Nangoi²
Hendrik Manossoh³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

Email : mestikaang@yahoo.com
hendrik_manossoh@yahoo.com

ABSTRACT

In order to accomplish public service quality enhancement, the regional government is under compulsion to allocate capital expenditure in APBD to increase it's fixed asset. Capital expenditure allocation will lead to reconcilable regional government's fixed assets and regional civilization's necessity. Region's income sources is the main key of it's financial independency without relying on central government. The main goal was to identify any firm and significant correlation between income sources and capital expenditure in Kota Tomohon's regional budgeting while the objects were income sources and capital expenditure realization in year 2011-2015. To acknowledged these two variables' correlation, researcher used Correlation Product Moment (Pearson) Test correlation analysis with the assistance of Software Program SPSS Version 19.0 for Windows. Correlation result 0,750 determined firm correlation between income sources and capital expenditure in Kota Tomohon since it was positive and approaching +1. It confirmed that increasing in Kota Tomohon's income was followed by increasing in Kota Tomohon's capital expenditure. Significancy result 0,086 validated significant correlation between these two variables as a result of it was lower or equal to 0,1 and it verified that hypothesis zero was accepted.

Keywords : Correlation, Income source, Capital expenditure

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejak diberlakukannya desentralisasi, pemerintah pusat Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri agar dapat mencapai pemerintahan yang efisien. . Desentralisasi akan berdampak positif bagi pembangunan suatu daerah karena menghasilkan otonomi yang merupakan suatu kebebasan untuk bertanggung jawab dalam mengatur dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan maupun bantuan pemerintah pusat. Dengan otonomi daerah, maka sebuah daerah akan dapat berdiri mandiri dan secara otomatis memajukan pembangunan nasional. (Mudrajad:2014)

Agar penyelenggaraan otonomi daerah dapat berjalan secara optimal, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar Daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan Daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Semua

penerimaan maupun pengeluaran daerah dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa dianggarkan dalam APBD yang memiliki masa tahun anggaran 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Belanja modal adalah salah satu klasifikasi belanja daerah berdasarkan jenis belanja yang merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal dibuat untuk menghasilkan aset tetap milik pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat di daerah bersangkutan. Sumber pendapatan dapat menjadi tolak ukur kemandirian suatu daerah karena semakin besar sumber pendapatan maka sangat memungkinkan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus bergantung pada bantuan pemerintah pusat.

Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara sumber pendapatan dengan belanja modal pada anggaran pemerintah Kota Tomohon (tahun 2011-2015).

TINJAUAN PUSTAKA

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

Seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 3, pengelolaan keuangan daerah meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

Anggaran Daerah

Pada dasarnya, anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun dalam bentuk kuantitatif dalam satuan moneter untuk satu periode. Sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter, anggaran pemerintah harus disusun secara cermat, akurat dan sistematis dengan menggunakan sistem anggaran yang baik. Fungsi anggaran lebih difokuskan bagaimana anggaran daerah tersebut dapat mengakomodir setiap kebutuhan untuk keperluan penilaian kinerja pemerintah yang ada demi evaluasi perkembangan pelayanan publik.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

APBD adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja daerah selama satu tahun yang disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Permendagri No.13 Tahun 2006). Pada Pasal 20 PP No. 58 Tahun 2005 disebutkan bahwa struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

- **Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Daerah dalam satu Tahun Anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah. Pendapatan Daerah dalam APBD dibagi menjadi:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

- **Belanja Daerah**

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran kas dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, belanja terdiri dari :

- Belanja Aparatur Daerah
- Belanja Pelayanan Publik
- Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
- Belanja Tidak Tersangka

- **Pembiayaan**

Menurut UU No. 32 Tahun 2004, pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Belanja Modal

Untuk menambah aktiva tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aktiva tetap pemerintah daerah seperti peralatan, bangunan, infrastruktur dan aktiva tetap lainnya. Belanja modal merupakan pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah jumlah aset atau kekayaan organisasi sector publik yang selanjutnya akan menambah anggaran operasional untuk biaya pemeliharaannya (Nordiawan:2006).

Penelitian Terdahulu

Sri Hayati Br. Sembiring (2009) dengan judul Analisis Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemeliharaan Dalam Realisasi Anggaran Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan dalam hasil penelitiannya bahwa secara simultan, Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh terhadap belanja pemeliharaan dan secara parsial, Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah juga mempunyai pengaruh terhadap belanja pemeliharaan, namun Belanja Modal memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap belanja pemeliharaan.

Arbie Gugus Wandira (2013) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia tahun 2012 menunjukkan dalam hasil penelitiannya bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel DAU, variabel DAK dan variabel DBH terhadap Belanja Modal dan secara simultan, variabel PAD, DAU, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Lingga Swastika (2013) dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal di Kabupaten Boyolali Periode Tahun 2005-2012 menunjukkan dalam hasil penelitiannya bahwa Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap pengalokasian belanja modal dan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh negatif terhadap pengalokasian belanja modal. Berdasarkan hasil analisis juga diketahui bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian korelasional yang merupakan penelitian atau kajian deskriptif dimana peneliti tidak hanya mendeskripsikan variabel-variabelnya tapi juga menguji sifat hubungan diantara variabel kuantitatif. (Setyosari : 2010)

Metode Pengumpulan Data

Data penelitian bersumber dari dokumen laporan realisasi APBD yang diperoleh langsung dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon. Dari laporan ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi Anggaran Belanja Modal dan realisasi Sumber Pendapatan Kota Tomohon tahun 2011 sampai 2015.

Metode Analisis Data

Untuk mengetahui hubungan kedua variabel peneliti menggunakan Analisis Korelasi dengan menggunakan *Software Program SPSS Version 19.0 for Windows* dan output data yang dihasilkan kemudian diinterpretasikan satu per satu. Analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Dalam perhitungan korelasi akan didapat koefisien korelasi yang digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan, arah hubungan dan berarti atau tidaknya hubungan tersebut. (Priyatno:2013)

- **Analisis Korelasi Bivariate**

Analisis korelasi bivariate adalah analisis hubungan antara dua variabel yaitu erat atau tidaknya hubungan, arah hubungan dan berarti atau tidaknya hubungan. Beberapa macam korelasi bivariate yaitu Korelasi Product Moment (Pearson), Korelasi Kendall's tau dan Korelasi Spearman. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Korelasi Product Moment yang mengukur hubungan secara linier antara dua variabel dan data yang digunakan adalah kuantitatif berupa data interval atau rasio yang bukan dari hasil kategorisasi. Contoh data ini misalnya data pendapatan, biaya produksi, penjualan dan sebagainya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sumber Pendapatan Kota Tomohon

Data sumber pendapatan Kota Tomohon yang diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Pendapatan Asli Daerah	8.137.372.100,00	5.422.640.000,00	12.500.975.000,00	16.486.431.368,00	24.989.931.368,00
1.Pajak Daerah	3.872.372.100,00	1.530.000.000,00	4.685.975.000,00	8.274.465.000,00	10.512.465.000,00
2.Retribusi Daerah	2.665.000.000,00	0,00	2.840.000.000,00	2.955.000.000,00	4.498.000.000,00
3.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	300.000.000,00	1.511.100.000,00	1.100.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
4.Lain-lain PAD yg Sah	1.300.000.000,00	2.381.540.000,00	3.875.000.000,00	3.756.966.368,00	8.479.466.368,00
Dana Perimbangan	314.989.072.500,00	339.395.799.761,00	396.674.986.000,00	436.867.415.000,00	426.687.859.000,00
1.Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	33.035.706.500,00	24.789.259.761,00	24.000.000.000,00	23.050.000.000,00	24.945.918.000,00
2.Dana Alokasi Umum	247.393.666.000,00	287.651.390.000,00	330.892.646.000,00	376.334.135.000,00	360.894.361.000,00
3.Dana Alokasi Khusus	34.559.700.000,00	26.955.150.000,00	41.782.340.000,00	37.483.280.000,00	40.847.580.000,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	33.360.350.011,00	7.737.174.214,00	9.225.550.150,00	11.500.250.000,00	93.793.962.954,00
1.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	6.473.550.011,00	7.737.174.214,00	9.225.550.150,00	11.500.250.000,00	20.881.286.954,00
2.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	26.886.800.000,00				72.912.676.000,00
Jumlah Pendapatan	356.486.794.611,00	352.555.613.975,00	418.401.511.150,00	464.854.096.368,00	545.471.753.322,00

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sumber pendapatan Kota Tomohon tahun 2011 terdiri dari :

- Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 8.137.372.100,00
- Dana Perimbangan sebesar Rp. 314.989.072.500,00 dan
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 33.360.350.011,00

Tahun 2012 terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 5.422.640.000,00
- Dana Perimbangan sebesar Rp. 339.395.799.761,00 dan
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 7.737.174.214,00

Tahun 2013 terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 12.500.975.000,00
- Dana Perimbangan sebesar Rp. 396.674.986.000,00 dan
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 9.225.550.150,00

Tahun 2014 terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 16.486.431.368,00
- Dana Perimbangan sebesar Rp. 436.867.415.000,00 dan
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 11.500.250.000,00

Tahun 2015 terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 24.989.931.368,00
- Dana Perimbangan sebesar Rp. 426.687.859.000,00 dan
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 93.793.962.954,00

Realisasi pendapatan Kota Tomohon tahun 2011 sampai dengan 2015 dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Tahun	Pendapatan (Rp)	Pertumbuhan (%)
1.	2011	356.486.794.611	-
2.	2012	352.555.613.975	-1,10
3.	2013	418.401.511.150	18,67
4.	2014	464.854.056.368	11,10
5.	2015	545.471.753.322	17,34

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan Kota Tomohon tahun 2011 sebesar Rp. 356.486.794.611 dan pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 1,10% menjadi Rp. 352.555.613.975. Tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 18,67% menjadi Rp. 418.401.511.150 dan tahun 2014 kembali meningkat sebesar 11,10% menjadi Rp. 464.854.056.368. Tahun 2015 pendapatan Kota Tomohon meningkat lagi sebesar 17,34% menjadi Rp. 545.471.753.322.

Belanja Modal Kota Tomohon

Realisasi belanja modal Kota Tomohon tahun 2011 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut :

No	Tahun	Belanja Modal (Rp)	Pertumbuhan (%)
1.	2011	72.030.475.238	-
2.	2012	88.333.804.435	22,63
3.	2013	131.854.115.508	49,26
4.	2014	148.209.485.516	12,40
5.	2015	119.918.057.199	-19,08

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi belanja modal Kota Tomohon tahun 2011 sebesar Rp. 72.030.475.238 dan pada tahun 2012 meningkat sebesar 22,63% menjadi Rp. 88.333.804.435. Tahun 2013 meningkat sebesar 49,26% menjadi Rp. 131.854.115.508 dan pada tahun

2014 kembali mengalami peningkatan sebesar 12,40% menjadi Rp. 148.209.485.516. Tahun 2015 belanja modal Kota Tomohon mengalami penurunan sebesar 19,08% menjadi 119.918.057.199.

Analisis Korelasi Product Moment

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan dan arah hubungan. Untuk mengetahui keeratan hubungan tersebut maka dapat dilihat dari besarnya koefisien korelasi dengan pedoman yaitu jika koefisien semakin mendekati 1 atau -1 maka hubungan erat atau kuat, sedangkan jika koefisien semakin mendekati 0 maka hubungan lemah. Untuk mengetahui arah hubungan maka dapat dilihat pada tanda nilai koefisien yaitu positif atau negatif. Apabila nilai koefisien positif berarti terdapat hubungan yang positif, artinya jika sumber pendapatan tinggi maka belanja modal akan meningkat. Sebaliknya apabila nilai koefisien negatif, artinya jika sumber pendapatan rendah maka belanja modal akan meningkat atau jika sumber pendapatan tinggi maka belanja modal akan menurun.

Hasil Uji Correlations antara variabel Sumber Pendapatan dengan Belanja Modal Tahun 2011-2015

Correlations			
		Sumber Pendapatan	Belanja Modal
Sumber Pendapatan	Pearson Correlation	1	.750
	Sig. (2-tailed)		.086
	N	6	6
Belanja Modal	Pearson Correlation	.750	1
	Sig. (2-tailed)	.086	
	N	6	6

Dari hasil output pada tabel di atas dapat diketahui hubungan antara sumber pendapatan dengan belanja modal Kota Tomohon adalah erat atau kuat, hal ini ditunjukkan oleh hasil koefisien korelasi sebesar 0,750. Karena nilai lebih mendekati angka 1 maka hasil ini menunjukkan bahwa hubungan kedua variabel tersebut erat atau kuat. Nilai koefisien bertanda positif berarti sumber pendapatan Kota Tomohon meningkat dan berdampak pada meningkatnya Belanja Modal Kota Tomohon. Hasil signifikansi antara kedua variabel ini adalah sebesar 0,086, yang menunjukkan bahwa hubungan kedua variabel ini adalah signifikan atau berarti.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan :

1. Terdapat hubungan yang erat dan kuat antara Sumber Pendapatan dengan Belanja Modal pada Kota Tomohon yaitu sebesar 0,750 karena mendekati +1 dan bersifat positif yang berarti pendapatan yang diperoleh Kota Tomohon mengalami peningkatan yang berdampak pada meningkatnya belanja modal Kota Tomohon.
2. Terdapat hubungan yang berarti atau signifikan antara Sumber Pendapatan dan Belanja Modal Kota Tomohon dilihat dari hasil signifikansi sebesar 0,086.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mencoba memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Aktivitas ekonomi pada Kota Tomohon menunjukkan pertumbuhan yang positif walaupun pada tahun 2012 sumber pendapatan Kota Tomohon mengalami sedikit penurunan. Untuk itu, pemerintah daerah perlu untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan melalui penggalian dan pengembangan potensi-potensi daerah yang akan berdampak positif bagi daerah.
2. Peningkatan pemerintah daerah dalam investasi belanja modal diharapkan dapat mampu meningkatkan kualitas layanan publik untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan periode anggaran selama 5 tahun, sehingga diharapkan untuk peneliti selanjutnya bisa menambahkan periode anggaran yang lebih banyak agar hasilnya lebih obyektif.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel yang lebih bervariasi dengan menggunakan variabel lain yang dapat berpengaruh atau memiliki hubungan dengan sumber pendapatan (misalnya belanja pemeliharaan dan lain-lain).

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2004. *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah Daerah. Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*. Jurnal Ekonomi 13 (2).
- Indarti & Sugiartiana. 2012. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Kota Semarang*. Jurnal Fokus Ekonomi. Volume 7. Nomor 2.
- Jaya & Dwirandra. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi*. E-Jurnal Akuntansi Univ Udayana. Volume 7. Nomor 1 :79-92.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 *tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad. 2014. *Otonomi Daerah*. Erlangga. Yogyakarta.
- Martini, dkk. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Buleleng Tahun 2006 – 2012*. e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 2.
- Mawarni, dkk. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Aceh)*. Jurnal Akuntansi. Volume 2 Nomor 2.
- Mentayani, Ida & Rusmanto. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Kota/Kabupaten di Pulau Kalimantan*. Jurnal Investasi Volume 9. Nomor 2.
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Okora & Pontoh. 2013. *Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus atas Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah*. Jurnal Accountability. Volume 2. Nomor 1.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.

- Priyatno, Duwi. 2013. *Analisis Korelasi, Regresi dan Multivariate dengan SPSS*. Gava Media. Yogyakarta.
- Sembiring, Sri Hayati. 2009. *Analisis Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemeliharaan Dalam Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara*.
- Setyosarim, Punaji. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Swastika, Lingga. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal di Kabupaten Boyolali Periode Tahun 2005-2012*.
- Syukriy, Abdullah & Abdul Halim. 2006. *Studi Atas Belanja Modal Pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan*. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Volume 2. Nomor 2.
- Tuasikal, Askam. 2008. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Volume 1. Nomor 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta.
- Wandira, Arbie Gugus. 2012. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus(DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Universitas Negeri Semarang, Indonesia. Accounting Analysis Journal 1 (3) (2013).